



PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021



INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat pemerintah Provinsi Banten (KP3B)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 12 (dua belas) Bulan yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Drs. H. E.KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19610323 198903 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISA RENJA.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021	7
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	7
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD	18
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.....	26
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	27
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
3.2. TUJUAN DAN SASARAN	33
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB IV PENUTUP	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Provinsi Banten merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Banten dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu perangkat daerah Inspektorat Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 1 tahun sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan 5 tahun (Renstra) SKPD. Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2021 pada prinsipnya berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten yang meliputi : pengawasan reguler SKPD Provinsi, Kab/Kota, Kas Opname, Stock opname, Bantuan Kuangan pada Kab/Kota,



Evaluasi pelayanan publik, Pemeriksaan Hibah/bansos, Pajak dan Retribusi, probity Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian teknis dan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Provinsi Banten dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

Pada akhirnya Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
- h. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- t. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15



Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

- a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
- b. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten;



- e. Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/ Inspektorat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.



Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja perubahan SKPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 DAN RENJA MURNI TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Capaian Kinerja

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 terhadap capaian renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan target tahun ke-3 (tiga) dari Periode Renstra tahun 2017-2022 yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Inspektorat Provinsi Banten Periode 2017-2022 dilakukan agar dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan target yang ada dalam renstra Inspektorat Provinsi Banten periode 2017-2022, seperti tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1
Target Indikator Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	70	75	80	85	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	-	3	3	4	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	3	3	4

Dibawah ini merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang mendukung dalam pencapaian indikator sasaran Inspektorat Daerah.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Capaian Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN													
3	0	2	0	1	Program Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Peningkatan Pengelolaan kearsipan dan pelayanan Perpustakaan	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 0 2 1 5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Capaian pengawasan internal bidang pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Capaian Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI. BPKP dan Itjen Kementerian	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI. BPKP dan Itjen Kementerian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	Percentase Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Percentase capaian Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Capaian Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana kerja Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2020 dan 2 (dua) tahun sebelumnya berdampak terhadap capaian indikator sasaran Inspektorat Provinsi Banten. Dengan rencana kerja yang tepat, maka dapat mempengaruhi capaian indikator sasaran Perangkat Daerah.

A. Capaian Keuangan

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp69.076.031.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp47.200.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp21.876.031.000,00. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 68.33% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 31.67% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan persentase 34.21% dari total anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.3
Anggaran Murni Tahun 2020

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47,200,000,000
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534
B.	BELANJA LANGSUNG	21,876,031,000
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,065,000,000
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	582,092,500
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135,690,000
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	69,076,031,000

Namun dikarenakan pada tahun 2020 terdapat bencana global virus Covid-19, maka pemerintah melakukan beberapa



kali refocusing anggaran sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan April, Mei, September dan Oktober. Hal ini pun terjadi pada anggaran Inspektorat Provinsi Banten, yang dimaksudkan sebagai partisipasi anggaran dalam penanggulangan bencana global virus Covid-19.

Selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan refocusing anggaran Pada bulan April, Belanja Tidak Langsung pada Inspektorat tidak mengalami perubahan anggaran, tetapi pada angka Rp47.200.000.000,00, namun pada Belanja Langsung ada pengurangan anggaran sebesar Rp3.164.937.200,00 atau berkurang sebesar 4.58%. Anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada refocusing pertama berjumlah Rp65.911.093.800,00.

Tabel 2.4
Refocusing Anggaran I (bulan April)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN JANUARI	PAGU ANGGARAN APRIL	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47,200,000,000	47,200,000,000	-	0.00%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	37,342,918,534	-	0.00%
B.	BELANJA LANGSUNG	21,876,031,000	18,711,093,800	(3,164,937,200)	-14.47%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000	24,569,000	(7,000,000)	-22.17%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000	5,976,600,000	(200,700,000)	-3.25%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000	136,000,000	(571,000,000)	-80.76%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000	156,750,000	(42,500,000)	-21.33%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000	189,156,000	(49,990,000)	-20.90%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500	6,310,443,300	(1,172,794,200)	-15.67%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000	1,751,554,000	(438,048,000)	-20.01%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	2,065,000,000	1,543,720,000	(521,280,000)	-25.24%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan	1,849,644,000	1,849,644,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan	582,092,500	448,667,500	(133,425,000)	-22.92%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen	135,690,000	107,490,000	(28,200,000)	-20.78%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	106,500,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	69,076,031,000	65,911,093,800	(3,164,937,200)	-4.58%

Pada refocusing anggaran yang ke-2 di bulan Mei, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1.633.559.000,00 atau sebesar 3.46%. Belanja Langsung juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp3.978.717.800,00 atau sebesar 21.26% dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung pada bulan April. Total pengurangan anggaran pada perubahan ke-2 ini sebesar Rp5.612.276.800,00 atau sebesar 8.51% jika di bandingkan dengan anggaran pada bulan April. Sehingga pada bulan Mei anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi Rp45.566.441.000,00 dan Belanja Langsung menjadi Rp14.732.376.000,00, sehingga total pagu anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada perubahan ke-2 di bulan Mei berjumlah Rp60.298.817.000,00.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran II (bulan Mei)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APRIL	PAGU ANGGARAN MEI	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3			
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47,200,000,000	45,566,441,000	(1,633,559,000)	-3.46%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	35,709,359,534	(1,633,559,000)	-4.37%
B.	BELANJA LANGSUNG	18,711,093,800	14,732,376,000	(3,978,717,800)	-21.26%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5,976,600,000	4,892,515,900	(1,084,084,100)	-18.14%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	6,310,443,300	5,401,269,600	(909,173,700)	-14.41%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,751,554,000	1,292,253,000	(459,301,000)	-26.22%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,543,720,000	1,128,885,000	(414,835,000)	-26.87%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000	943,720,000	(905,924,000)	-48.98%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	448,667,500	244,767,500	(203,900,000)	-45.45%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	105,000,000	(1,500,000)	-1.41%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	65,911,093,800	60,298,817,000	(5,612,276,800)	-8.51%



Pada refocusing anggaran yang ke-3 di bulan September, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran cukup besar yakni Rp10.077.441.000,00 atau sebesar 22.12% dibandingkan dengan anggaran di bulan Mei. Sedangkan untuk Belanja Langsung di perubahan ke-3 ini tidak mengalami perubahan. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada bulan September sebesar Rp50.221.376.000,00 atau berkurang Rp10.077.441.000,00 dibandingkan dengan anggaran dibulan Mei.

Tabel 2.6
Perubahan Anggaran III (bulan September)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MEI	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45,566,441,000	35,489,000,000	(10,077,441,000)	-22.12%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	8,219,276,176	(1,637,805,290)	-16.62%
2	Tambahan Penghasilan PNS	35,709,359,534	27,269,723,824	(8,439,635,710)	-23.63%
B.	BELANJA LANGSUNG	14,732,376,000	14,732,376,000	-	0.00%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	4,892,515,900	-	0.00%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	5,401,269,600	-	0.00%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,292,253,000	-	0.00%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,128,885,000	1,128,885,000	-	0.00%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	943,720,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	244,767,500	-	0.00%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Ijen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	60,298,817,000	50,221,376,000	(10,077,441,000)	-16.71%

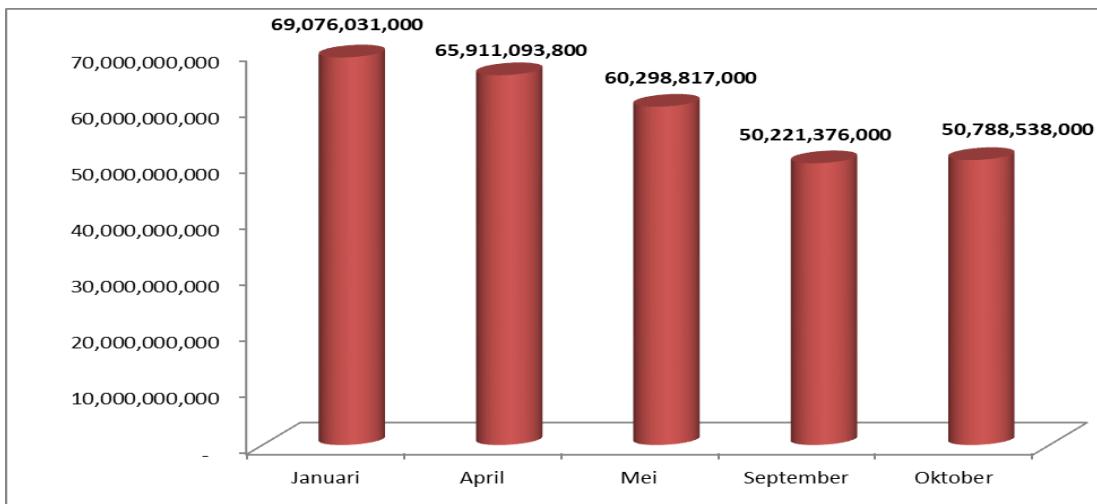


Pada perubahan anggaran di bulan Oktober Belanja Tidak Langsung tidak mengalami perubahan, sedangkan pada Belanja Langsung ada penambahan anggaran sebesar Rp567.162.000,00 atau sebesar 3.85% dari anggaran Belanja Langsung pada bulan September. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten menjadi Rp50.788.538.000,00 atau bertambah sebesar Rp567.162.000,00 dibandingkan bulan September.

Tabel 2.7
Perubahan Anggaran (bulan Oktober)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PAGU ANGGARAN OKTOBER	PERUBAHAN (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35,489,000,000	35,489,000,000		0.00%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176	8,219,276,176		0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824	27,269,723,824		0.00%
B.	BELANJA LANGSUNG	14,732,376,000	15,299,538,000	567,162,000	3.85%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000		0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	52,860,000	(57,140,000)	-51.95%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	5,717,447,900	824,932,000	16.86%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000		0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000		0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000		0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	4,702,919,600	(698,350,000)	-12.93%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,333,253,000	41,000,000	3.17%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaiannya Daerah	1,128,885,000	1,201,485,000	72,600,000	6.43%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	1,002,870,000	59,150,000	6.27%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	442,017,500	197,250,000	80.59%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	235,210,000	127,720,000	118.82%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000		0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	50,221,376,000	50,788,538,000	567,162,000	1.13%

Grafik 2.1
Perububahan Anggaran Tahun 2020



Tabel 2.8
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35,489,000,000	34,834,128,665	98.15
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176	8,074,382,465	98.24
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824	26,759,746,200	98.13
B.	BELANJA LANGSUNG	15,299,538,000	14,290,063,717	93.40
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	100.00
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	52,860,000	46,401,000	87.78
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5,717,447,900	5,185,176,417	90.69
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	88,236,700	64.88
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	122,250,000	77.99
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	138,512,000	73.23
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	4,702,919,600	4,497,424,600	95.63
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,333,253,000	1,313,332,000	98.51
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,201,485,000	1,197,185,000	99.64
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,002,870,000	935,420,000	93.27
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	442,017,500	422,828,000	95.66
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	235,210,000	220,529,000	93.76
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	98,200,000	93.52
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	50,788,538,000	49,124,192,382	96.72

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis capaian kinerja Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020, berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Rasio Capaian
				2020	2020	2020
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	80	87,67	109,6%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	3	3	100%
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Pada tahun 2020 indikator sasaran pada Inspektorat Provinsi Banten tercapai dengan sempurna. Bahkan pada indikator sasaran nilai SAKIP rasio capaian 109,6% yang dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Provinsi Banten dalam sudah memenuhi tingkat akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan standar.

Capaian nilai SAKIP ini merupakan kontribusi dari kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang berada dalam Program Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Nilai SAKIP OPD :

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mendukung nilai capaian SAKIP;
- b. Terlaksananya seluruh target kegiatan maupun sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- c. Terpenuhinya seluruh laporan perencanaan maupun laporan kinerja SAKIP OPD.

Pada capaian Nilai Maturitas SPIP dan capaian Level Kapabilitas APIP juga telah memenuhi target, sesuai dengan hasil penilaian dari BPKP. Walaupun penilaian atas Maturitas SPIP dilakukan pada tahun 2019 dan akan dilakukan penilaian kembali 3 (tiga) tahun setelahnya, namun Inspektorat Provinsi Banten tetap menjaga kualitas dalam sistem pengawasan



internal yang memang sudah menjadi tugas mandatori bagi Inspektorat Provinsi Banten.

Penilaian atas capaian level kapabilitas APIP oleh BPKP dilakukan di tahun 2020 dan Inspektorat Provinsi Banten mendapatkan level 3.

Capaian nilai Maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP merupakan kontribusi dari kegiatan-kegiatan teknis pengawasan pada program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Nilai Maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP :

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mendukung kinerja pengawasan;
- b. Peningkatan kompetensi APIP yang memadai;
- c. Praktik profesional APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko yang memadai;
- d. Budaya kerja dan hubungan internal APIP yang profesional.

Keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran merupakan kontribusi dari capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020.

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

1) Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 90.69%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi kontrak dan selisih nilai harga, efisiensi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan dan belanja rutin kantor disesuaikan dengan pemakaian.

Keluarannya berupa :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5 Keg	5 Keg	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	10 Keg	10 Keg	100%
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 Keg	12 Keg	100%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	112 Keg	112 Keg	100%
Outcome			
Terpenuhinya peralatan dan jasa pendukung terhadap kinerja aparat pengawasan	100% dari capaian kinerja program	100% dari capaian kinerja program	100%

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 100%. Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	6 dokumen	6 dokumen	100%
Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	1 dokumen	1 dokumen	100%
Outcome			
Tersusunnya Laporan kinerja keuangan dan neraca aset	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

3) Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 87.78%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi dikarenakan adanya efisiensi belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan laporan.

Keluarannya berupa :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	4 Keg	4 Keg	100%
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	1 Keg	1 Keg	100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	10 Keg	10 Keg	100%
Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan	3 Keg	3 Keg	100%
Outcome			
Terevaluasinya kegiatan dan pelaporan, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 64.88%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi dikarenakan penyelenggaraan diklat untuk jafung jumlahnya dibatasi dari Pusat dan pelaksanaan nya melalui Pembelajaran Jarak Jauh.

Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	3 kegiatan	1 kegiatan	100%
Belanja pengiriman Diklat Fungsional	15 Jabatan	18 Jabatan	120%
Outcome			
Terpenuhinya Kapasitas Aparatur terhadap peningkatan kompetensi kinerja pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

5) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 93.52%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat realisasi Pengelolaan perpustakaan khusus OPD 0% dikarenakan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk pengawasan belum tersedia.

Keluarannya berupa :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pengelolaan Kearsipan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD	12 kegiatan	0 kegiatan	0%
Outcome			
Terpenuhinya buku pengawasan dan tatakelola arsip	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

6) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 77.99%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi kontrak, efisiensi Belanja makan minum dan efisiensi belanja narasumber. Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya kebijakan sistem tentang Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

II. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten

Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 73.23%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi kontrak, belanja makan minum rapat dan narasumber, keluarannya berupa :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semester dan pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Terpenuhinya peralatan dan jasa pendukung terhadap kinerja aparat pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

2) Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan

Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 95.63%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi belanja makan minum rapat, narasumber, honor tim dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 129 laporan hasil pengawasan bidang pendapatan, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Bidang Pendapatan	7 Keg	7 Keg	100%
Reviu Bidang Pendapatan	4 Keg	4 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan	5 Keg	5 Keg	100%
Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Keg	1 Keg	100%
Outcome			
Tersedianya LHP Pendapatan Provinsi Banten pada Tahun 2020	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

3) Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 98.51%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 99 laporan hasil pengawasan bidang belanja modal dan barang milik daerah, yang terdiri dari :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	8 Keg	8 Keg	100%
Reviu Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	3 Keg	3 Keg	100%
Outcome			
Menurunnya Angka Penyimpangan pada bidang belanja modal dan barang milik daerah	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

4) Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 99.64%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 53 laporan hasil pengawasan perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian kepegawaian daerah, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Keg	2 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10 Keg	10 Keg	100%
Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Outcome			
Tersedianya bahan evaluasi kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Banten	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

5) Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 93.27%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 150 laporan hasil pengawasan



internal bidang belanja barang dan jasa dan bantuan keuangan daerah, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	11 Keg	11 Keg	100%
Monitoring kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	4 Keg	4 Keg	100%
Outcome			
Terselesaikannya Pengawasan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

6) Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten

Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 95.66%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi kontrak, efisiensi makan minum dan Narasumber. Keluaran dari kegiatan ini berupa 31 laporan hasil pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi Banten	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan rencana aksi PPK Daerah provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya data dan informasi pembangunan hasil pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

7) Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian

Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian tahun 2020 dengan



capaian penyerapan sebesar 93.76%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efisiensi perjalanan dinas luar daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 4 laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya data dan informasi hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

A. Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Provinsi Banten pada Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai.
2. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
3. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;



5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan ;
2. Cepatnya perubahan regulasi ;
3. Umpam balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal
4. Mutasi aparatur pengawas internal ;
5. Heterogenitas permasalahan.
6. Peluang:
 7. Kepercayaan dari Kepala Daerah ;
 8. Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah ;
 9. Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada Iembaga Pengawasan ;
10. Joint Audit dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan BPKP
11. Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang harus mendapatkan prioritas terutama pada pengawasan, isu dan permasalahan yang mendesak yang seringkali masyarakat laporkan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat terutama pada bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dll, kurangnya informasi bagi publik tentang pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan yang semua ini merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten dalam pengawasan kesemua OPD yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.10
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021		PAGU INDIKATIF	
		KELUARAN SUB KEGIATAN	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Awal RKPD	Rencana Awal RENJA
1	2					6	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					34,424,569,000.00	40,446,660,000.00
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	14 Bulan	Nilai SAKIP 85	34,400,000,000.00	39,923,620,000.00
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	14 Bulan	Nilai SAKIP 85		479,570,000.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	14 Bulan	Nilai SAKIP 85	24,569,000.00	43,470,000.00
B	BELANJA LANGSUNG					20,115,019,000.00	20,355,740,000.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105,844,000.00	89,974,000.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	2 Dokumen	Nilai SAKIP 85	45,792,000.00	52,085,000.00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Nilai SAKIP OPD	18 Laporan	Nilai SAKIP 85	2,582,000.00	6,100,000.00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	4 Dokumen	Nilai SAKIP 85	57,470,000.00	31,789,000.00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					809,550,000.00	727,000,000.00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	1 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	134,550,000.00	52,000,000.00
	2. Peningkatan kompetensi Aparatur	Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur	Nilai SAKIP OPD	3 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	675,000,000.00	675,000,000.00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021		PAGU INDIKATIF	
		KELUARAN SUB KEGIATAN	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Awal RKPd	Rencana Awal RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	49,000,000.00	98,000,000.00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	176,116,000.00	314,258,400.00
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	2 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	97,000,000.00	285,195,000.00
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Nilai SAKIP OPD	1 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	105,000,000.00	-
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	12 Bulan	Nilai SAKIP 85	700,000,000.00	671,052,000.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	2 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	1,016,000,000.00	921,452,000.00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	3 Kegiatan	Nilai SAKIP 85	500,000,000.00	500,000,000.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	12 Bulan	Nilai SAKIP 85	-	665,462,400.00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	12 Bulan	Nilai SAKIP 85	2,847,551,900.00	1,971,267,600.00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021		PAGU INDIKATIF	
		KELUARAN SUB KEGIATAN	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Awal RKPD	Rencana Awal RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	6 Unit 23 Unit 146 Unit 4 Kegiatan	Nilai SAKIP 85 Nilai SAKIP 85 Nilai SAKIP 85 Nilai SAKIP 85	224,910,000.00 406,020,000.00 131,770,000.00 680,032,500.00	1,442,732,500.00 406,020,000.00 131,770,000.00 688,694,100.00
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP	5 Kegiatan 25 Kegiatan 7 Kegiatan 12 Kegiatan 8 Kegiatan	Nilai 4 SPIP Nilai 4 SPIP Nilai 4 SPIP Nilai 4 SPIP Nilai 4 SPIP	459,852,000.00 6,479,894,800.00 502,938,000.00 660,138,000.00 180,993,000.00	8,283,815,800.00 6,412,471,500.00 502,938,000.00 660,138,000.00 180,993,000.00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021		PAGU INDIKATIF	
		KELUARAN SUB KEGIATAN	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Awal RKPd	Rencana Awal RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Nilai Maturitas SPIP	12 Bulan	Nilai 4 SPIP	1,826,340,000.00	1,711,150,750.00
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Nilai Maturitas SPIP	1 Kegiatan	Nilai 4 SPIP	41,040,000.00	138,320,000.00
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kapabilitas APIP	12 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	287,800,000.00	225,900,000.00
	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kapabilitas APIP	12 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	287,800,000.00	225,900,000.00
10	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kapabilitas APIP	18 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	1,592,312,800.00	2,104,441,000.00
	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kapabilitas APIP	18 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	1,276,462,800.00	1,777,141,000.00
	2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kapabilitas APIP	1 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	71,250,000.00	76,900,000.00
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kapabilitas APIP	3 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	244,600,000.00	236,700,000.00
	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kapabilitas APIP	1 Kegiatan	Level 3 Kapabilitas APIP	-	13,700,000.00
JUMLAH						54,539,588,000.00	60,802,400,000.00



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten terkait pembahasan Anggaran Tahun 2021 bersama berbagai pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Musrenbang tersebut. Selain hal tersebut, dalam forum OPD yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten tidak terdapat juga usulan program/kegiatan dari OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan program-program yang terdapat di Inspektorat Provinsi Banten dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten 2017-2022. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				2021
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	85
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	3

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program Inspektorat Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Target
							2021
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		Nilai	85
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%
				Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
							2021	2021	2021
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	66,7%	66,7%
				Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP			Nilai	4	3	75%
		Penyelenggaraan Pengawasan					100%	132,3%	132,3%
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	100%



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
							2021	2021	2021
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Dokumen	98 Dokumen	148 Dokumen	151%
				Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan : Reviu Laporan Kinerja</i>	Dokumen	84 Dokumen	83 Dokumen	98%
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan : Reviu Laporan Keuangan</i>	Dokumen	96 Dokumen	160 Dokumen	177%
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Dokumen	40 Dokumen	80 Dokumen	200%



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Terget	Realisasi	Capaian
							2021	2021	2021
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Level Kapabilitas APIP		Capaian Level Kapabilitas APIP		Level	3	3	100%
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			Persentase	100%	100%	100%
				Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
					<i>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	100%
					<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah matriks sandingan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang ada dalam nomenklatur SIPD.

Berdasarkan hasil Pemetaan dan Pemutahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada matriks sandingan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten ada perubahan program pada urusan pengawasan, yang awalnya hanya ada 2 program bertambah menjadi 3 (tiga) dengan nama program yang berbeda dari nama program di tahun sebelumnya, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja program nilai SAKIP OPD;
- b. Program Penyelenggaran Pengawasan, dengan indikator kinerja program Maturitas SPIP;
- c. Program Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator kinerja program Kapabilitas APIP.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berisikan kegiatan-kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah, seperti didalamnya ada administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur.

Program Penyelenggaran Pengawasan didalamnya memuat kegiatan-kegiatan pengawasan, yaitu :

- a. Audit, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, tugas



serta tanggung jawab manajemen telah dilaksanakan dengan baik.

- b. Reviu, Penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Monitoring dan Evaluasi, menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan hasil yang diwujudkan.

Pada program ini, para APIP memberikan *Assurance* atas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Program Pendampingan dan Asistensi merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dari Perangkat Daerah ke Inspektorat serta dari Inspektorat ke pihak stakeholders dalam hal ini yang membidangi pengawasan baik di daerah maupun di pusat. Pada program ini, para APIP menjalankan fungsinya untuk memberikan *Consulting* kepada Perangkat Daerah untuk dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuannya.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD (Januari 2021)				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat Prov.Banten	Capaian Nilai SAKIP	85	48,492,807,500
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			89,974,000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			40,446,660,000
3.	Administrasi Kepgawainan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			727,000,000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,719,597,400
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,421,452,000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			2,636,730,000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov.Banten			1,451,394,100



No	Rancangan Awal RKPD (Januari 2021)				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Capaian Nilai Maturitas SPIP	4	9,979,251,500
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			8,268,100,750
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten & 8 Kab/kota			1,711,150,750
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas APIP	3	2,330,341,000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Provinsi Banten			225,900,000
2.	Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten			2,104,441,000
TOTAL					60,802,400,000



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 mengacu pada 4 (empat) kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program- program prioritas pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemrintah Daerah;
- c. Mengedepankan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;
- d. Meningkatkan kapabilitas APIP

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021, selanjutnya dijabarkan dalam 2 (Dua) Program antara lain :

- a. Program Tata Kelola Pemerintahan
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 10 (Sepuluh) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2019 dan 2020 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :



- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azaz dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.
- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Provinsi Banten.

Serang, Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si.
NIP. 19610323 1989031009

